

KOORDINASI DINAS SOSIAL DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENANGANAN ANAKJALANAN USIA SEKOLAH DI KABUPATEN SUBANG

Sutangsa, Kamal Maruf, Gendis Nurnazmumah Rinaldi

Dosen Tetap Program Pascasarjana Universitas Subang¹, Dosen Tetap Program Pascasarjana Universitas Subang², Mahasiswa Pascasarjana Universitas Subang³

sutangsapls@gmail.com¹, kamalmaruf@unsub.ac.id, gendisnr@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Dinas Sosial dengan Instansi Terkait dalam Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Koordinasi Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, komunikasi, kontrol, dan kepemimpinan.. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tidak ada pilihan lain daripada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, Saling lempar tugas dan tunjuk tanggung jawab, sehingga dalam hal ini tugas pokok dalam penanganan anak jalanan menjadi jauh dari kata harapan. komunikasi, diskusi hanya diadakan saat adanya instruksi dari pemerintah kabupaten subang terkait penertiban anak jalanan dari kota, setelahnya tidak ada komunikasi berkelanjutan, terlebih tindakan, dengan alasan kesibukan permasalahan-permasalahan lainnya. control, meski pengawasan dilakukan akan tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan selanjutnya, sehingga sebenarnya pengawasan belum bisa benar benar dilaksanakan dengan baik. Sedangkan fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah bila mana hasil yang seharusnya tidak teralisasi dengan baik, maka harus dilaksanakan tindakan selanjutnya yang lebih baik. dan kepemimpinan, terbaginya tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka dalam menangani permasalahan penanganan anak jalanan, tumpang tindih tugas dan kewajiban terbelengkalainya tugas tugas tersebut.

Sesuai dengan sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, komunikasi, control, dan kepemimpinan, Koordinasi Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang Belum Optimal sebagaimana dijelaskan dalam paragraph diatas.

Kata Kunci : Koordinasi, Komunikasi

ABSTRACT

The author's goal of conducting this research was to find out the Coordination of the Social Service with Related Agencies in Handling School-Age Street Children in Subang Regency. This research and writing discusses matters relating to how the Coordination of Handling School-Age Street Children in Subang Regency is in accordance with the important factors in coordination According to Mcfarland in Kaloh (2006), namely authority and responsibility, communication, control, and leadership.

This study used a qualitative descriptive research approach, because this study aims to obtain an overview of the research used to reveal problems in the work life of government organizations and observations, interviews, literature studies, and documentation. There is no other choice but to make the researcher himself the main research instrument. Data sources were obtained from informants through direct observation and interviews and documents were obtained in the form of regulations and data processing.

The results showed that the Coordination of Handling School-Age Street Children in Subang Regency was in accordance with the important factors in coordination According to Mcfarland in Kaloh (2006), namely authority and responsibility, throwing tasks and assigning responsibility to each other, so that in this case the main task in handling street children becomes far from hope. communication, discussions were only held when there were instructions from the Subang regency government regarding controlling street children from the city, after that there was no ongoing communication, especially action, on the grounds of being busy with other problems. control, even though supervision is carried out but no further action is taken, so that actually supervision cannot be carried out properly. While the function of supervision itself is if the results that should not be realized properly, then better further action must be taken. and leadership, the division of their leadership duties and responsibilities in dealing with the problem of handling street children, the overlapping of tasks and obligations, the neglect of these tasks.

In accordance with the important factors in coordination According to Mcfarland in Kaloh (2006), namely authority and responsibility, communication, control, and leadership, the Coordination of Handling School-Age Street Children in Subang Regency is Not Optimal as described in the paragraph above.

Keywords: Coordination, Communication

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini anak jalanan menjadi masalah publik di Kabupaten Subang, keberadaan mereka sering kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban, dan keamanan. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang tak kunjung teratasi. Maka dari itu menjadi masalah sosial baik di kota besar maupun di kota kecil. Berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah anak jalanan di perkotaan salah satunya adalah tingginya angka putus sekolah pada tingkat

sekolah dasar yang belum berhasil diatasi, sehingga masalah anak jalanan tak kunjung teratasi dan merupakan fenomena sosial di kabupaten subang.

Anak jalanan adalah anak yang berusia antara 15-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum (Panduan Pendataan PMKS&PSKS, 2007). Pada awalnya terdapat dua kategori anak jalanan, yaitu *children on the street* dan *children from families of the street*

Sejalan dengan Peraturan daerah

Provinsi Jawa Barat nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi PMKS dan PSKS. sebagaimana tertera pada pasal 5 (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi diantaranya yaitu anak jalanan.

Dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Subang berupaya mencari jalan keluar baik melalui kegiatan maupun program yang diharapkan pelan namun pasti mampu mengurangi jumlah anak jalanan, yang tujuannya mewujudkan kesejahteraan dengan melibatkan berbagai pihak, agar upaya penanganan tersebut menjadi upaya bersama. Sebagaimana dikemukakan Adi (2005 : 06) bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat, tidak akan terwujud bila tidak

dikembangkan usaha-usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Penanganan anak jalanan di Kabupaten Subang dilakukan dengan upaya Pelaksanaan penanganan PMKS yaitu dengan adanya pencegahan timbulnya PMKS, Penanganan dan pembinaan PMKS, koordinasi pemulangan PMKS ke daerah asal dan pencegahan kembali menjadi PMKS, pembinaan dan pengawasan PMKS jalanan di Kab/kota daerah asal, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan adanya PMKS jalanan yang berada di Kabupaten Subang.

Data Dinas Sosial Kabupaten Subang menunjukkan, dari sekitar 145.000 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2021, sedikitnya 25.000 di antaranya merupakan anak telantar. Mereka terdiri atas 2.096 orang balita, 7.134 anak-anak, 8.700 lanjut usia, 15 korban trafficking, 81 gelandangan, 95 pengemis, 81 anak jalanan, 141 tuna susila, dan 7.715 wanita rawan sosial ekonomi.

Jumlah Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang

No	Tahun	Anak jalanan usia sekolah			Jumlah
		7-12	13-15	16-18	
1	2017	9	11	12	32
2	2018	15	11	20	46
3	2019	14	33	17	64
4	2020	26	76	44	146
5	2021	30	81	36	147

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Koordinasi Dinas Sosial Dengan Instansi Terkait Dalam Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah Di Kabupaten Subang?

KAJIAN PUSTAKA

Koordinasi menurut pendapat Hasibuan (2004 : 86) adalah sebagai berikut “Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam

pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi”.

Kemudian definisi Koordinasi menurut pendapat Dann Sugandha (2001 : 12) mengemukakan bahwa : “Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi yang berbeda fungsi secara benar-benar yang mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian dengan efisien”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelaslah didalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi hendaknya dilaksanakan penyerempakan kerja dengan menggunakan perhitungan waktu yang tepat dan akurat, sehingga tidak terjadi kekembaran kerja atau kekosongan didalam pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja akan lebih terarah dengan cara bekerjasama antara unit sehingga saling membantu dan saling melengkapi.

Kemudian dalam mencapai tujuan suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu dapat melaksanakan suatu kerjasama antara Dinas/Instansi lain yang terkait sehingga akan tercipta suatu kondisi kerja yang harmonis, serasi dan terpadu dimana didalamnya terdapat saling pengertian, saling mengisi dan saling melengkapi diantara Dinas/Instansi tersebut, sehingga dengan adanya koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pendapat lain tentang Koordinasi menurut Soewarno Handyaningrat (2006 : 117) adalah : Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatu padukan kegiatan- kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas-tugas organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) mengemukakan empat faktor penting dalam koordinasi, sehingga

menentukan pencapaian koordinasi yang efektif yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab
Didalam setiap organisasi apabila kita pandang dari situasi vertical, maka kita akan melihat beberapa tingkat organisasi dimana masing-masing tingkat tersebut mempunyai kewenangan sendiri-sendiri. Dipandang dari situasi horisontal maka nampak beberapa kelompok, fungsi, divisi, atau territorial.
2. Komunikasi
komitmen dalam komunikasi dapat memberikan keuntungan seperti yang dijelaskan diatas. Apabila dalam koordinasi penanganan anak jalanan di Kabupaten Subang yang dilakukan antara Dinas Sosial dengan lembaga terkait lainnya terdapat komitmen yang baik, maka koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Subang dapat memberikan manfaat baik untuk lembaga ataupun aparaturnya.
3. Kontrol
Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memastikan apakah sesuatu aktivitas telah sesuai dengan apa yang seharusnya dicapai. Setiap rencana dapat menjadi usang (*out date*) sehingga memerlukan perbaikan. Untuk mengetahui apakah suatu rencana sudah usang maka diperlukan pengawasan. (Gary Deasler, 2007 : 333). Control sebagai intinya adalah “*Governing Influence*”. *Governing* mencakup : pengarahan (*directing*); pengendalian (*restraining*); pelopor (*initiating*); dan memonitor (*monitoring*) semua aktivitas dan tingkah laku. *Influence* (mempengaruhi) mencakup tindakan serta tingkah laku dalam bentuk kewenangan (*authority*), kekuasaan (*power*), tanggung jawab (*responsibility*) dan dapat dimintakan tanggung jawab (*accountability*).
4. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sebagai pengaruh antar pribadi, yang dilakukan pada suatu situasi dan dilakukan melalui proses komunikasi menuju pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan selalu mencakup usaha dari pemimpin (*influence*) yang mempengaruhi tingkah laku pengikut (yang dipengaruhi) dalam suatu situasi tertentu. Kemampuan memimpin sangat penting didalam pelaksanaan koordinasi yang efektif untuk pencapaian tujuan organisasi yang baik. Berbagai teknik kepemimpinan memungkinkan si pemimpin dapat mengarahkan bawahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2005:3), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara langsung dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang ada.

HASIL PENELITIAN

1. Kewenangan dan tanggung jawab

Kepemimpinan dalam permasalahan Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang dinilai belum optimal, hal tersebut terjadi karna tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dalam menangani permasalahan penanganan anak jalanan terpisah dan terbagi, tidak mengacu pada

tujuan serta visi misi Kabupaten Subang dalam menangani permasalahan anak jalanan, baik Dinas Sosial maupun instansi terkait lainnya memiliki tujuan yang berbeda dengan penanganan anak jalanan. Sebenarnya SOP terkait program penanganan anak-anak jalanan usia sekolah di Kabupaten Subang sudah ada dan pembagian daripada tugas dan tanggung jawab antar antar instansi sudah jelas. Struktur Organisasi yang ada di Dinas Sosial juga merupakan struktur yang fungsional, dimana pembagian tugas didasarkan pada skill dan kemampuan instansi. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, baik pada Dinas Sosial maupun instansi terkait lainnya. Semuanya saling melunjuk dan melimpahkan tugas, koordinasi menjadi tidak jelas, dan penanganan anak jalanan usia sekolah di kabupaten subang belum sesuai harapan. Sehingga, pada penerapannya Dinas Sosial dan Instansi terkait masih saling tunjuk dan lempar tugas.

Saling lempar tugas dan tunjuk tanggung jawab mengakibatkan tugas pokok dalam penanganan anak jalanan menjadi jauh dari kata harapan, hal tersebut juga terbukti dilihat secara kasat mata yakni masih terdapatnya anak jalanan usia sekolah yang tinggal di tengah tengah kota, tentu alasan ekonomi adalah factor utama.

2. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait koordinasi Dinas Sosial dalam Penanganan anak jalanan di kabupaten subang belum optimal. Hal tersebut terlihat dari terdapatnya konsistensi yang longgar antara Dinas Sosial dan instansi lain dalam menjalankan program pembinaan anak jalanan di Kabupaten Subang. Dalam hal ini, kejelasan komunikasi saja tidak akan membuat sebuah program berjalan dengan semestinya melainkan membutuhkan adanya konsistensi daripada instansi terkait. Tidak adanya media sebagai sarana pelaporan anak terlantar dan minimnya intensitas dari sosialisasi yang seharusnya

dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Subang dan Instansi Terkait dengan masyarakat menjadi penyebab program penanganan anak jalanan usia sekolah di Kabupaten Subang tidak optimal karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam PERBUB Subang Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Standar Minimal Pelayanan Bidang Sosial. Selain daripada itu forum diskusi hanya diadakan saat adanya instruksi dari pemerintah kabupaten subang terkait penertiban anak jalanan dari kota, setelahnya tidak ada komunikasi berkelanjutan, terlebih tindakan, dengan alasan kesibukan permasalahan-permasalahan lainnya.

komunikasi yang diberikan oleh pemerintah haruslah jelas dan tidak membingungkan, dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik tidak hanya harus dijalankan oleh para pelaksana kebijakan saja, namun juga dengan sasaran daripada kebijakan. Adapun dalam program ini, anak terlantarlah yang menjadi sasaran daripada program pembinaan.

3. Kontrol

Pengawasan dilakukan melalui usaha pemantauan yang dilakukan oleh pihak dinas sosial dan satuan polisi pamong praja yaitu dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada di Daerah Subang, setelah melakukan patroli lantas masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya ditindak lanjuti. namun tidak ada tindakan selanjutnya setelah penjaringan, hal ini yang membuat anak jalanan tidak mendapatkan efek jera.

Kontrol dalam permasalahan Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Di kabupaten Subang dinilai belum optimal, hal tersebut dinilai karna meski pengawasan dilakukan akan tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan selanjutnya Sedangkan fungsi dari pengawasan itu

sendiri adalah bila mana hasil yang seharusnya tidak teralisasi dengan baik, maka harus dilaksanakan tindakan selanjutnya yang lebih baik, sedangkan dalam hal ini tindakan berkelanjutannya tidak ada. Pengawasan bukan hanya maslaah pemantauan atau control saja, melainkan langkah yang akan dicapai untuk kedepannya.

4. Kepemimpinan

Banyak tugas yang dilakukan oleh instansi dalam melayani Masyarakat sehingga proses penanganan anak jalanan kurang focus. Sehingga hasil dari proses tersebut masih kurang maksimal.

Selain itu, penanganan anak jalanan tidak dapat menyentuh masyarakat, mengingat masih banyaknya anak yang berkeliaran dijalanan. Gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan dari masyarakat terhadap hasil kerja Dinas Sosial dan Instansi Terkait.

KESIMPULAN

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah menangani permasalahan penanganan anak jalanan terpisah dan terbagi, tidak mengacu pada tujuan serta visi misi Kabupaten Subang dalam menangani permasalahan anak jalanan, baik Dinas Sosial maupun instansi terkait lainnya memiliki tujuan yang berbeda dengan penanganan anak jalanan.
2. Komunikasi: Tidak adanya media sebagai sarana pelaporan anak terlantar dan minimnya intensitas dari sosialisasi yang seharusnya dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Subang dan Instansi Terkait dengan masyarakat menjadi penyebab program penanganan anak jalanan usia sekolah di Kabupaten Subang tidak optimal karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam PERBUB Subang Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Standar Minimal Pelayanan Bidang Sosial.

3. Kontrol: Meskipun pengawasan dilakukan akan tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan selanjutnya Sedangkan fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah bila mana hasil yang seharusnya tidak teralisasi dengan baik, maka harus dilaksanakan tindakan selanjutnya yang lebih baik, sedangkan dalam hal ini tindakan berkelanjutannya tidak ada. Pengawasan bukan hanya maslaah pemantauan atau control saja, melainkan langkah yang akan dicapai untuk kedepannya.
4. Kepemimpinan: kepemimpinan demokratis yang dimiliki oleh Kadinsos Kabupaten Subang, berpengaruh kepada tingginya kepuasan kerja dari para aparatur di Dinas Sosial Kabupaten Subang.

SARAN

- 1) Perlu dilaksanakan Sosialisasi antara Dinas Sosial dan Instansi terkait lainnya yang bertugas dan permasalahan penanganan anak jalanan. Penerapan SOP terkait program penanganan anak jalanan usia sekolah di Kabupaten Subang yang sudah ada perlu di kaji Kembali, agar pembagian daripada tugas dan tanggung jawab antar antar instansi menjadi jelas
- 2) Peningkatan penanganan masalah anak jalanan dengan memanfaatkan partisipasi orang tua dan masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan yaitu dengan tidak memberikan uang kepada anak jalanan tujuannya agar jumlah anak jalanan tidak terus bertambah. Sehingga dalam hal ini Perlu dibuat sebuah peraturan mengenai pemberian uang kepada anak jalanan

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Pengantar pada Pengertian*

dan Beberapa Pokok Bahasan. Jakarta : UI-Press.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta : Rineka Cipta.

Handayani, Soewarno, 2006. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan,* Jakarta : Gunung Agung.

Handoko, T. H. 2005, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta : BPFE,

Hasibuan, Malayu. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Cetakan Ke tujuh, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara,* Jakarta : Sinar Grafika.

Kaloh Johannis, 2006, *Konsep Koordinasi Dalam Proses Administrasi,* Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan

Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moekijat, 2004, *Koordinasi (Suatu Tindakan Teoritis),* Bandung : Mandar Maju

Muhsin Kalida dan Bambang Sukanto, *Jejak Kaki Kecil di Jalanan,* Cakruk Publishing, Yogyakarta: 2012.